

## ABSTRAK

Pengembangan wilayah Pulau Madura semakin gencar sejak dicanangkannya proyek *Jembatan Surabaya Madura*. Proyek ini merupakan implementasi dari kebijakan industrialisasi sebagai langkah akselerasi pembangunan di pulau Madura. Salah satu upaya untuk menopang kebijakan industrialisasi di pulau Garam adalah membangun dan mengembangkan fasilitas sosial ekonomi penduduk, terutama di wilayah kabupaten Dati II Bangkalan sebagai pintu gerbang pulau Madura sekaligus sebagai bagian dari wilayah pengembangan *Gerbangkertosusilo*.

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengevaluasi kualitas fasilitas sosial ekonomi terhadap standar fasilitas bagi penduduk, 2) Untuk mengetahui perbedaan kondisi fasilitas sosial ekonomi antara wilayah pusat SWP dan wilayah Sub SWP 3) Untuk mengetahui hirarki pusat-pusat pelayanan sosial ekonomi pada masing-masing kecamatan.

Penelitian ini menggunakan metode sensus. Data yang terkumpul dianalisis dengan analisis kuantitatif meliputi: tabel frekuensi, scalogram dan uji statistik korelasi product moment, test "t" dan analisa varian (ANOVA).

Hasil penelitian menggunakan analisis korelasi menunjukkan bahwa : 1) Terdapat korelasi positif antara kepadatan penduduk dengan besarnya ketersediaan fasilitas sosial ekonomi, 2) Terdapat korelasi negatif antara jumlah penduduk dengan besarnya ketersediaan fasilitas sosial ekonomi.

Distribusi fasilitas sosial ekonomi bervariasi menurut jenis, jumlah tipe maupun jumlah unit fasilitas. Berdasarkan jumlah unit fasilitas dengan pembobotan diperoleh kecamatan Kamal yang menjadi pintu gerbang Madura justru berada di ranking pertama diatas kecamatan Bangkalan yang menjadi ibukota kabupaten.

Hasil analisis dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nyata kondisi fasilitas sosial ekonomi antara kecamatan yang menjadi pusat SWP dengan kecamatan yang menjadi Sub SWP.

Hasil analisis dengan menggunakan analisa varian (ANOVA), menunjukkan bahwa : 1) Terdapat perbedaan nyata kondisi fasilitas sosial ekonomi pada tiap-tiap unit kawasan pembangunan, 2) Tidak terdapat perbedaan nyata hirarki pusat-pusat pelayanan sosial ekonomi pada tiap-tiap kawasan pembangunan.